

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, perusahaan diharuskan untuk tidak hanya memperhatikan pertumbuhan bisnis, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan pelaporan yang bertanggung jawab. Dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan persaingan di pasar, transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan menjadi sangat penting. Salah satu tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan tersebut adalah kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan perusahaan berperan sebagai indikator fundamental dalam menilai kesehatan dan keberlanjutan suatu entitas bisnis di tengah dinamika ekonomi global. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik memiliki kemampuan lebih tinggi untuk bertahan, berkembang, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh yang memegang pemangku kepentingan (Lassala *et al.*, 2021). Transformasi teknologi dan disrupsi digital selama dekade terakhir telah mengubah situasi persaingan bisnis, menciptakan urgensi bagi perusahaan untuk beradaptasi dan mempertahankan stabilitas keuangannya (Moşteanu, 2024). Pasar modal Indonesia sebagai cerminan aktivitas ekonomi nasional menunjukkan volatilitas yang signifikan, terutama pada periode 2021-2023 yang dipengaruhi oleh pemulihan pasca-pandemi dan tekanan inflasi global. Ekspektasi investor terhadap kinerja keuangan perusahaan semakin

meningkat, ditandai dengan perhatian yang lebih besar pada laporan keuangan dan prospek pertumbuhan (Chouaibi *et al.*, 2022).

Tren global menunjukkan pergeseran paradigma dalam evaluasi kinerja keuangan yang tidak lagi berfokus semata pada profitabilitas jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang (Ghosh & Singh, 2025). *World Economic Forum* tahun 2023 menegaskan pentingnya ketahanan keuangan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia semakin mengedepankan efisiensi operasional, pengelolaan risiko yang prudent, dan alokasi sumber daya yang optimal untuk mempertahankan kinerja keuangan yang stabil (Wang, 2024). Fenomena ini juga terlihat di Indonesia, dimana investor institusional cenderung memilih perusahaan dengan track record kinerja keuangan yang konsisten dan berkelanjutan (Hassan, 2023). Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan korelasi positif antara kestabilan kinerja keuangan dengan minat investasi, terutama untuk saham-saham berkapitalisasi besar.

Studi menunjukkan bahwa stabilitas kinerja keuangan menjadi faktor penentu dalam keputusan alokasi modal investor, terutama di pasar berkembang seperti Indonesia (Rahman & Wijaya, 2024). Penelitian oleh Chen *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan fluktuasi laba yang minimal dan kebijakan dividen yang konsisten cenderung mendapatkan valuasi premium 15-20% dibandingkan kompetitor dengan kinerja yang lebih volatile. Konsistensi ini dianggap sebagai indikator manajemen yang berkualitas dan strategi bisnis yang tangguh dalam menghadapi berbagai siklus ekonomi. Menurut Laporan Global

Investment Trends 2024 yang diterbitkan Morgan Stanley, terjadi peningkatan signifikan alokasi portofolio global ke pasar Asia Tenggara, dengan Indonesia mendapatkan porsi terbesar kedua setelah Vietnam, didorong oleh kestabilan kinerja keuangan emiten-emiten utamanya (Morgan Stanley, 2024).

Dalam konteks pasar modal Indonesia, stabilitas kinerja finansial telah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi seleksi saham-saham unggulan, terutama yang masuk dalam perhitungan indeks prestisius. Analisis komprehensif terhadap pola pergerakan harga saham periode 2019-2023 memperlihatkan bahwa emiten dengan volatilitas laba yang rendah namun memiliki tren pertumbuhan yang konsisten cenderung mempertahankan posisinya dalam indeks LQ45 lebih lama dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi namun tidak stabil (Gunawan & Hartono, 2023). Fenomena ini sejalan dengan temuan studi internasional yang dilakukan Blackrock Global Institute yang menyatakan "stabilitas pendapatan menjadi karakteristik utama yang dicari investor institusional dalam era ketidakpastian ekonomi, bahkan mengalahkan faktor pertumbuhan tinggi namun berisiko," (Jones & Smith, 2024).

Dalam struktur pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklasifikasikan saham-saham emiten ke dalam beberapa kelompok indeks untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja sektor maupun keseluruhan pasar. Salah satu indeks yang paling dikenal adalah Indeks LQ45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan fundamental keuangan yang baik. Indeks ini

digunakan sebagai acuan utama oleh investor dan analis dalam menilai pergerakan pasar saham Indonesia.

Indeks LQ45 sebagai barometer utama pasar modal Indonesia merepresentasikan 45 perusahaan dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Sudarman & Diana, 2022). Perusahaan yang masuk dalam indeks ini umumnya merupakan pemimpin pasar dalam sektornya masing-masing dan memiliki fundamental bisnis yang kuat. Kriteria seleksi ketat yang diterapkan BEI dalam menentukan konstituen LQ45 termasuk evaluasi rutin terhadap kinerja keuangan, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar (Yanto & Sari, 2025). Pada periode 2021-2023, komposisi LQ45 mengalami beberapa perubahan yang mencerminkan dinamika bisnis dan preferensi investor. Perusahaan dalam indeks ini berasal dari berbagai sektor industri, termasuk perbankan, konsumen, infrastruktur, pertambangan, dan properti, sehingga kinerja kolektif mereka menjadi representasi akurat kondisi ekonomi makro Indonesia (Laksono & Puspita, 2024).

Fluktuasi kinerja keuangan perusahaan LQ45 selama periode 2021-2023 menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan analis pasar modal. Ketidakstabilan profitabilitas tercermin dari volatilitas rasio-rasio keuangan utama seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). Penurunan efisiensi operasional terlihat dari meningkatnya biaya operasional terhadap pendapatan pada beberapa perusahaan indeks. Kemampuan menghasilkan laba per lembar saham (EPS) juga menunjukkan tren yang tidak konsisten, menciptakan ketidakpastian dalam proyeksi pendapatan investor. Laporan keuangan tahunan beberapa emiten LQ45 mengungkapkan tantangan dalam mempertahankan

margin keuntungan di tengah tekanan inflasi dan persaingan usaha yang semakin ketat. Banyak perusahaan melaporkan penurunan rata-rata *return on investment* yang mengindikasikan menurunnya efektivitas penggunaan modal untuk menghasilkan keuntungan (Rofifudin *et al.*, 2025).

Data empiris berikut menyajikan gambaran komprehensif mengenai tren kinerja keuangan perusahaan-perusahaan indeks LQ45 selama periode 2021-2023 berdasarkan indikator keuangan utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rata-rata Kinerja Keuangan Perusahaan Indeks LQ45 Periode 2021-2023

Indikator Kinerja Keuangan	2021	2022	2023	Perubahan (2021-2023)
<i>Return on Assets</i> (ROA) (%)	7,45	6,82	5,93	-20,40%
<i>Return on Equity</i> (ROE) (%)	12,67	11,24	9,76	-22,97%
<i>Net Profit Margin</i> (NPM) (%)	15,32	14,08	12,65	-17,43%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Perusahaan Indeks LQ45 (2021-2023)

Tabel 1.1 menunjukkan tren penurunan signifikan pada tiga indikator kinerja keuangan utama perusahaan-perusahaan indeks LQ45 selama periode 2021-2023, dengan Return on Assets (ROA) menurun 20,40% menjadi 5,93%, Return on Equity (ROE) mengalami penurunan paling tajam sebesar 22,97% menjadi 9,76%, dan Net Profit Margin (NPM) turun 17,43% menjadi 12,65%. Penurunan konsisten pada ketiga indikator ini mencerminkan melemahnya kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan, di mana perusahaan semakin kurang efisien dalam mengkonversi aset menjadi laba (ROA), kurang mampu menghasilkan imbal hasil yang menarik bagi pemegang saham (ROE), dan mengalami tekanan pada margin keuntungan (NPM) yang dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional, persaingan pasar yang ketat, atau menurunnya permintaan, (Auliyah & Saleh, 2024). Fenomena ini mengisyaratkan tantangan

fundamental dalam lingkungan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan blue chip Indonesia, yang berpotensi memengaruhi keputusan investasi, strategi operasional perusahaan, dan kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan yang menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (Fajriah *et al.*, 2022). Konsep ini menekankan pada struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang (Syah, 2021). Penerapan GCG menjadi semakin krusial bagi perusahaan publik, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas bisnis dan ekspektasi pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip utama GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan (Hasanudin, 2023). Implementasi GCG yang efektif tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan kinerja keuangan melalui pengambilan keputusan yang lebih baik, pengawasan yang efektif, dan pengelolaan risiko yang prudent (Fatmasari, 2024). Mekanisme GCG dalam perusahaan dapat diterapkan melalui berbagai instrumen, termasuk dewan komisaris independen, komite audit, struktur kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Yanti *et al.*, 2021).

Dewan Komisaris Independen berperan sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan pengelolaan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan Komisaris Independen

didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, direksi, komisaris lainnya, atau pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Septiani & Yoewono, 2023). Keberadaan Dewan Komisaris Independen berkorelasi positif dengan kinerja keuangan perusahaan melalui peningkatan efektivitas pengawasan terhadap manajemen, pengurangan konflik keagenan, dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan strategis (Arjang & Rahman, 2023). Teori keagenan (*Agency Theory*) menjadi landasan konseptual yang menjelaskan bagaimana komisaris independen mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan antara pemegang saham dan manajemen (Nugraha *et al.*, 2021). Beberapa penelitian empiris menemukan hubungan positif antara proporsi komisaris independen dengan profitabilitas dan nilai perusahaan (Permana *et al.*, 2024; Halim, 2021; Andini *et al.*, 2022; Putri *et al.*, 2023), sementara studi lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau bahkan negatif (Yoewono, 2023; Maloka & Dwija, 2021; Kartorahardjo, 2021). Kesenjangan empiris ini menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Komisaris Independen tidak hanya bergantung pada komposisi kuantitatif, tetapi juga pada kompetensi, integritas, dan aktivitas pengawasan yang dilakukan.

Komite Audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang bertugas memastikan integritas laporan keuangan perusahaan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite Audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, terutama terkait proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi (Sari *et al.*, 2022). Efektivitas

Komite Audit berhubungan erat dengan kualitas laporan keuangan dan transparansi informasi yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan perusahaan (Ersadarih & Ratmono, 2024). Teori Sinyal (*Signaling Theory*) mendasari konsep bahwa keberadaan Komite Audit yang kompeten memberikan sinyal positif kepada pasar mengenai kualitas tata kelola dan keandalan informasi keuangan perusahaan (Castano *et al.*, 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Komite Audit dengan karakteristik tertentu seperti independensi, keahlian keuangan, dan frekuensi pertemuan yang memadai berkorelasi positif dengan indikator kinerja keuangan seperti ROA dan ROE (Reynaldi & Kuntadi, 2024; Nadiah & Filianti, 2022). Namun, beberapa studi lain gagal menemukan hubungan yang signifikan, terutama ketika keberadaan Komite Audit hanya bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi (Ramadaniyah & Triana, 2022; Laksono, 2021). Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana karakteristik kualitatif Komite Audit mempengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Kepemilikan Institusional mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau institusi lainnya. Kepemilikan Institusional didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional terhadap total saham yang beredar, yang merefleksikan tingkat monitoring eksternal terhadap kinerja manajemen (Inggridaputri & Wahidahwati, 2024). Investor institusional dengan kepemilikan signifikan memiliki insentif dan kapabilitas untuk melakukan pengawasan aktif terhadap keputusan manajerial yang berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan perusahaan (Widyaningtyas *et al.*, 2024). Teori Pemangku

Kepentingan (*Stakeholder Theory*) memberikan kerangka konseptual tentang bagaimana Kepemilikan Institusional mendorong manajemen untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Dwiyanti *et al.*, 2024). Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat Kepemilikan Institusional yang tinggi berhubungan dengan peningkatan kinerja keuangan melalui pengawasan yang lebih intensif dan tekanan untuk adopsi praktik tata kelola yang lebih baik (Abedin *et al.*, 2022; Ogabo *et al.*, 2021; Anjani *et al.*, 2024). Sebaliknya, beberapa penelitian menemukan hubungan non-linear atau bahkan negatif, yang mengindikasikan adanya titik optimal Kepemilikan Institusional atau potensi konflik kepentingan antar investor institusional (Simbolon, 2025; Rahmadi & Wahyudi, 2021). Kesenjangan temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana karakteristik spesifik investor institusional dan konteks perusahaan memoderasi hubungan antara Kepemilikan Institusional dan kinerja keuangan.

Kepemilikan Manajerial merepresentasikan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen puncak perusahaan, termasuk direksi dan komisaris. Kepemilikan Manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh direktur eksekutif dan anggota dewan terhadap total saham yang beredar, yang mencerminkan tingkat keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Kristanti *et al.*, 2024). Struktur kepemilikan ini berpotensi mengurangi konflik keagenan dengan menjadikan manajer sebagai pemilik, sehingga keputusan yang diambil cenderung berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang yang berimplikasi positif pada kinerja keuangan (Kasbar *et al.*, 2023). Teori Konvergensi Kepentingan (*Interest Convergence*

Theory) menjelaskan bahwa peningkatan Kepemilikan Manajerial menciptakan konvergensi kepentingan antara pengelola dan pemilik, mengurangi perilaku oportunistik, dan mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan (Kartikasari *et al.*, 2022). Beberapa penelitian empiris mendokumentasikan hubungan positif antara Kepemilikan Manajerial dengan berbagai indikator kinerja keuangan seperti profitabilitas, efisiensi operasional, dan nilai pasar perusahaan (Hakim & Hindasah, 2025; Jayati & Cindiyasari, 2024; Iisyanti *et al.*, 2024). Namun, studi lain menemukan hubungan non-monoton dimana Kepemilikan Manajerial pada level tertentu dapat mengarah pada perilaku *entrenchment* yang merugikan kinerja perusahaan (Mensah, 2022; Pacheco, 2022). Kesenjangan hasil penelitian menunjukkan kompleksitas interaksi Kepemilikan Manajerial dengan faktor kontekstual seperti struktur industri, ukuran perusahaan, dan tata kelola lainnya.

Berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan yang telah dipaparkan, terlihat adanya keterkaitan antara mekanisme *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan perusahaan, khususnya pada perusahaan indeks LQ45 yang mengalami fluktuasi kinerja selama periode 2021-2023. Penurunan indikator keuangan utama pada perusahaan LQ45 di tengah implementasi mekanisme tata kelola perusahaan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas praktik GCG yang diterapkan. Keberadaan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial sebagai pilar utama dalam struktur tata kelola perusahaan belum menunjukkan konsistensi pengaruhnya terhadap kinerja keuangan berdasarkan studi terdahulu. Kesenjangan empiris ditambah dengan konteks spesifik perusahaan LQ45 yang merepresentasikan emiten *blue-chip* di Indonesia, menjadikan penelitian pengaruh

Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI (2021-2023) menjadi relevan dilakukan. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris baru serta implikasi praktis bagi perusahaan dan regulator dalam mengoptimalkan struktur tata kelola untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Good Corporate Governance yang diproksikan oleh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui rasio profitabilitas pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pendahuluan latar belakang masalah tersebut, saya dapat mengidentifikasi beberapa masalah utama:

1. Terjadi penurunan signifikan pada indikator kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 selama periode 2021-2023, dengan ROA menurun 20,40%, ROE menurun 22,97%, dan NPM menurun 17,43%, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam efisiensi pengelolaan aset, ekuitas, dan margin keuntungan.
2. Meskipun mekanisme Good Corporate Governance telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan indeks LQ45, kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tersebut tetap mengalami penurunan, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas praktik GCG yang diimplementasikan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, berikut adalah batasan masalah yang relevan dengan penelitian tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45. Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh empat mekanisme Good Corporate Governance yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan yang diukur melalui indikator ROA pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
5. Apakah Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
2. Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
3. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
4. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
5. Menganalisis pengaruh simultan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan topik *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan perusahaan. Berikut adalah rincian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1.5.1. Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur dan pengetahuan di bidang akuntansi keuangan, khususnya mengenai hubungan antara mekanisme *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan perusahaan.

2. Memberikan perspektif baru terhadap teori keagenan (*agency theory*), teori sinyal (*signaling theory*), dan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dalam konteks implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia.
3. Mengisi kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) mengenai efektivitas berbagai mekanisme *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan, khususnya pada perusahaan *blue-chip* dalam indeks LQ45.
4. Menyediakan basis empiris untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan dalam konteks pasar modal Indonesia.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi dan rekomendasi praktis mengenai implementasi mekanisme *Good Corporate Governance* yang optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, serta mengidentifikasi aspek-aspek tata kelola yang memerlukan penguatan.

2. Bagi Investor

Menyediakan referensi dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan struktur tata kelola perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha.

3. Bagi Regulator

Berkontribusi pada evaluasi efektivitas regulasi terkait *Good Corporate Governance* dan memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan yang mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang lebih baik di Indonesia.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menyediakan data empiris dan metodologi yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian lanjutan mengenai tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan pada berbagai konteks dan periode waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan *Theory*

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Agency theory yang dikembangkan Jensen & Meckling (2019) menjadi landasan utama GCG yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) dalam pengelolaan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) hadir sebagai mekanisme untuk mengurangi potensi konflik tersebut melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dengan diterapkannya GCG secara konsisten pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, diharapkan manajemen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik modal, sehingga mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan pada periode 2021–2023

Konflik keagenan muncul ketika:

1. Terjadi asimetri informasi, dimana manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham.

2. Moral hazard, dimana manajemen cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri.
3. Adverse selection, dimana pemegang saham tidak dapat memastikan bahwa manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

2.1.2 Stakeholder Theory (Teori Pemangku Kepentingan)

Stakeholder theory menurut Zuro (2024) menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya kepada pemegang saham. Dalam konteks ini, penerapan GCG yang baik dapat menciptakan kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak seperti karyawan, investor, pelanggan, regulator, dan masyarakat. Ketika perusahaan mampu menjaga hubungan yang sehat dengan seluruh stakeholder melalui tata kelola yang baik, maka hal tersebut akan berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan, (Paiva et al., 2024)

2.1.3 Good Corporate Governance

2.1.3.1 Definisi Good Corporate Governance

OECD (2023) menyatakan *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang menyediakan struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, menentukan cara mencapai tujuan tersebut, dan memantau kinerja. Tata kelola yang baik memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan yang sejalan dengan kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya serta memfasilitasi pemantauan yang efektif.

Menurut Razali & Arshad (2024) *Good Corporate Governance* adalah sistem prinsip, kebijakan, prosedur, dan praktik yang jelas yang menentukan bagaimana organisasi dikendalikan, diarahkan, dan dipertanggungjawabkan untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham sambil mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya.

Aguilera et al. (2023) menjelaskan GCG merupakan kerangka kompleks dari mekanisme formal dan informal yang mengatur hubungan kontraktual dan sosial antara penyedia sumber daya utama perusahaan dan mereka yang mengendalikan sumber daya tersebut, dengan tujuan memaksimalkan penciptaan nilai bagi semua pemangku kepentingan.

Good Corporate Governance adalah sistem aturan, praktik, dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingannya, (Chauhan & Amit, 2023). Menurut Mudasiru & Hassan (2024) *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai sistem pengaturan dan pengendalian yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dengan menegakkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan."

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa GCG pada dasarnya merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder. Sistem ini menjamin bahwa

manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Kumar & Singh (2024) telah mengidentifikasi lima prinsip utama *good corporate governance* dalam konteks pasar modern. Berikut adalah hasil analisis mendalam dari masing-masing prinsip tersebut:

1. Transparansi Struktural dan Operasional

Hal ini menekankan bahwa transparansi tidak hanya sebatas pengungkapan informasi keuangan, tetapi juga mencakup kejelasan struktur organisasi dan proses operasional perusahaan.

- a. **Transparansi Digital:** Pengembangan platform digital yang memberikan akses real-time kepada stakeholders tentang keputusan strategis dan operasional utama.
- b. **Pengungkapan Proaktif:** Mengadopsi pendekatan "*disclose first, explain later*" untuk mengurangi asimetri informasi.
- c. **Transparansi Rantai Nilai:** Pengungkapan lengkap tentang rantai pasokan, praktik pengadaan, dan hubungan dengan pemasok.
- d. **Pelaporan Komprehensif:** Integrasi laporan keuangan dengan metrik non-keuangan yang mencerminkan nilai jangka panjang.

2. Akuntabilitas Multi-tingkat

Akuntabilitas harus beroperasi pada berbagai tingkatan dalam organisasi, tidak hanya terbatas pada jajaran eksekutif tertinggi.

- a. Akuntabilitas 360 Derajat: Sistem di mana semua tingkat manajemen bertanggung jawab kepada atasan, bawahan, dan rekan kerja.
- b. Metrik Kinerja Terdistribusi: KPI yang disesuaikan untuk setiap tingkat organisasi, terkait dengan tujuan utama perusahaan.
- c. Mekanisme Pelaporan Berlapis: Sistem pelaporan yang memungkinkan visibilitas dari tingkat operasional hingga dewan direksi.
- d. Koneksi Insentif-Kinerja: Skema kompensasi yang terhubung langsung dengan pencapaian tujuan berkelanjutan jangka panjang.

3. Responsibilitas terhadap Stakeholder

Prinsip ini menekankan kewajiban perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan.

- a. Pemetaan Pemangku Kepentingan Dinamis: Identifikasi dan penilaian ulang berkala terhadap pemangku kepentingan dan kebutuhan mereka.
- b. Keterlibatan Stakeholder Terdiferensiasi: Pendekatan yang disesuaikan untuk berbagai pemangku kepentingan berdasarkan tingkat dampak dan pengaruh.
- c. Audit Dampak Sosial: Evaluasi sistematis dampak keputusan perusahaan terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan.
- d. Responsibilitas Antisipatif: Mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi signifikan dan mengembangkan strategi mitigasi proaktif.

4. Independensi dalam Pengambilan Keputusan

Pentingnya proses pengambilan keputusan yang bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya.

- a. Struktur Komite Independen Majemuk: Pembentukan komite khusus independen untuk mengawasi area-area strategis tertentu.
- b. Protokol Konflik Kepentingan Berbasis AI: Sistem berbasis algoritma untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi konflik kepentingan.
- c. Mekanisme Keputusan Berjenjang: Proses pengambilan keputusan dengan pemisahan jelas antara proposal, evaluasi, dan pengesahan.
- d. Penilaian Independensi Berkala: Evaluasi reguler terhadap independensi anggota dewan dan eksekutif kunci.

5. Kesenjangan dalam Perlakuan Stakeholder

Prinsip ini menuntut bahwa semua pemangku kepentingan, terutama pemegang saham, harus diperlakukan secara adil dan setara.

- a. Keadilan Prosedural Terukur: Metrik yang mengukur keadilan dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.
- b. Sistem Perlindungan Pemegang Saham Minoritas: Mekanisme yang melindungi hak pemegang saham minoritas dalam keputusan strategis.
- c. Platform Demokratisasi Suara: Sistem digital yang memungkinkan semua pemangku kepentingan mengekspresikan pandangan mereka pada keputusan penting.
- d. Kerangka Kerja Alokasi Nilai: Model distribusi nilai yang memastikan semua pemangku kepentingan menerima bagian yang proporsional dari nilai yang diciptakan.

Kumar & Singh (2024) juga menekankan bahwa prinsip-prinsip ini perlu disesuaikan dengan konteks spesifik perusahaan, industri, dan wilayah geografis, menciptakan model tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap lingkungan bisnis yang terus berubah.

2.1.3.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *good corporate governance* (GCG) menurut Aguilera et al. (2023) dibagi menjadi tiga kategori utama: mekanisme internal formal, mekanisme eksternal formal, dan mekanisme relasional. Berikut adalah uraian dari masing-masing kategori:

1. Mekanisme Internal Formal

Mekanisme ini mencakup struktur dan proses internal perusahaan yang secara langsung dapat dikendalikan oleh manajemen dan dewan direksi. Tujuannya adalah memastikan keputusan yang diambil sesuai prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

- a. Struktur dewan dan komite: Termasuk ukuran dewan, komposisi (misalnya proporsi direksi independen), serta keberagaman (gender, pengalaman, latar belakang). Struktur ini memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap manajemen.
- b. Sistem kompensasi eksekutif berbasis kinerja: Memberikan insentif kepada manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham dan tujuan jangka panjang perusahaan.

- c. Audit internal dan manajemen risiko: Berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak dini serta menjaga kepatuhan terhadap prosedur internal.
- d. Struktur kepemilikan dan hak pemegang saham: Meliputi distribusi kepemilikan saham dan sejauh mana pemegang saham memiliki hak suara atau pengaruh terhadap keputusan strategis perusahaan.

2. Mekanisme Eksternal Formal

Mekanisme ini berasal dari lingkungan eksternal perusahaan, terutama dari sistem hukum, peraturan, dan pasar. Mereka berperan dalam menciptakan batasan dan insentif dari luar agar perusahaan tetap bertindak sesuai prinsip GCG.

- a. Regulasi dan kepatuhan pasar modal: Misalnya peraturan dari otoritas pasar modal yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi dan perlindungan investor.
- b. Audit eksternal dan pemantauan: Auditor independen mengevaluasi laporan keuangan perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.
- c. Tekanan pasar untuk kontrol korporasi: Pasar dapat memberikan sanksi tidak langsung seperti penurunan harga saham jika perusahaan tidak dikelola dengan baik.
- d. Standar pelaporan global: Seperti IFRS atau GRI yang membantu perusahaan menyusun laporan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan secara internasional.

3. Mekanisme Relasional

Berbeda dari dua kategori sebelumnya, mekanisme ini bersifat informal dan berakar pada hubungan sosial, nilai budaya, serta persepsi publik terhadap perusahaan. Meskipun tidak tertulis atau diatur secara ketat, mekanisme ini berpengaruh kuat dalam membentuk perilaku perusahaan.

- a. Reputasi dan legitimasi sosial: Perusahaan yang menjaga reputasi baik akan lebih dipercaya publik dan mendapatkan dukungan sosial yang lebih besar.
- b. Jaringan dewan direksi: Hubungan antaranggota dewan dengan pihak luar (misalnya regulator, pelaku industri) dapat membuka akses ke informasi dan sumber daya penting.
- c. Aktivisme pemangku kepentingan: Termasuk tekanan dari LSM, komunitas, atau investor institusi yang mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
- d. Budaya tata kelola perusahaan: Nilai dan norma yang hidup dalam organisasi yang mendorong transparansi, etika kerja, dan pengambilan keputusan yang adil.

2.1.3.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Aguilera et al. (2023) manfaat dan pentingnya Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks dunia bisnis:

1. Meningkatkan Kepercayaan Investor

GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor karena memberikan jaminan bahwa perusahaan dijalankan dengan prinsip yang transparan, akuntabel, dan adil.

- a. Investor akan merasa lebih yakin bahwa keputusan-keputusan yang diambil perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan pemegang saham.
- b. Dengan transparansi dalam laporan keuangan dan keputusan strategis yang jelas, investor dapat memantau kinerja perusahaan dan mengurangi ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan dalam berinvestasi.
- c. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih menarik bagi investor domestik maupun asing karena dianggap lebih aman dan stabil.

2. Mengurangi Risiko Kecurangan dan Korupsi

Salah satu prinsip utama dalam GCG adalah akuntabilitas dan transparansi, yang berperan penting dalam mengurangi potensi kecurangan dan korupsi dalam perusahaan.

- a. Audit internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas perusahaan tercatat dengan baik dan dapat diperiksa kapan saja.
- b. Pengawasan oleh dewan komisaris dan komite audit dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh manajemen.

- c. Dengan adanya struktur kepemilikan yang jelas dan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, peluang untuk praktek-praktek buruk (seperti manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan dana) dapat diminimalkan.

3. Mendorong Efisiensi Operasional

GCG yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan menciptakan sistem yang terorganisir dan mengurangi pemborosan sumber daya.

- a. Pengelolaan yang lebih terstruktur dan proses pengambilan keputusan yang jelas membantu menghindari inefisiensi dalam penggunaan sumber daya (seperti tenaga kerja, modal, dan waktu).
- b. Manajemen risiko yang lebih baik juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah dengan lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional.
- c. Komitmen terhadap kinerja dan hasil juga menjadi perhatian utama dalam GCG, yang mendorong perusahaan untuk selalu mencari cara yang lebih baik dan efisien dalam menjalankan operasionalnya.

4. Menjamin Kelangsungan Usaha Jangka Panjang

Prinsip-prinsip GCG dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dapat tetap berkelanjutan dalam jangka panjang dengan cara yang beretika dan bertanggung jawab.

- a. Keberlanjutan usaha dicapai melalui pengelolaan yang transparan, serta pengawasan yang mengarah pada keputusan yang tepat dan berbasis data yang valid.

- b. Manajemen yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (bukan hanya pemegang saham), seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan, akan lebih mampu bertahan menghadapi tantangan pasar dan perubahan lingkungan bisnis.
- c. Perusahaan yang mengimplementasikan GCG dengan baik memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi krisis atau ketidakpastian ekonomi, sehingga dapat memastikan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang.

2.1.3.5 Indikator *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, GCG diukur melalui empat indikator utama (Kumar & Singh, 2024), yaitu:

1. Dewan Komisaris Independen

Menggambarkan proporsi komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali atau manajemen. Semakin tinggi proporsi ini, diharapkan pengawasan terhadap manajemen semakin objektif.

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}}$$

Rumus ini mengukur proporsi komisaris yang independen di dalam perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin besar kemungkinan perusahaan memiliki pengawasan yang efektif, yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan transparansi

2. Komite Audit

Mengacu pada jumlah anggota komite audit yang membantu dewan komisaris

dalam fungsi pengawasan, khususnya dalam proses pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

Rumus ini mengukur jumlah anggota yang terlibat dalam komite audit perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk memantau dan menilai kegiatan audit serta kepatuhan perusahaan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.

3. Kepemilikan Institusional

Persentase saham yang dimiliki oleh institusi keuangan atau lembaga lain. Kepemilikan ini dianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajerial karena adanya tekanan untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Rumus ini mengukur persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan investasi. Kepemilikan institusional sering kali berhubungan dengan pengawasan yang lebih baik, serta meminimalkan potensi pengaruh negatif dari pemegang saham individu.

4. Kepemilikan Manajerial

Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan ini, diharapkan manajemen lebih bertanggung jawab terhadap keputusan bisnis karena mereka juga berperan sebagai pemilik.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Rumus ini mengukur persentase saham yang dimiliki oleh manajer atau

anggota manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi sering kali menunjukkan adanya keselarasan antara kepentingan manajer dan pemegang saham.

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hasil atau pencapaian yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu, (Lestari et al., 2023). Menurut Kruglov & Shaw (2024) kinerja keuangan mencerminkan kesehatan keuangan keseluruhan perusahaan selama periode tertentu dan dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan serupa di industri yang sama atau untuk membandingkan industri atau sektor secara agregat.

Menurut Olayinka (2022) kinerja keuangan adalah indikator penting dari kesehatan dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan, yang memengaruhi keputusan investasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kinerja keuangan merupakan hasil dari pengelolaan aset yang efektif oleh manajemen perusahaan, yang mencakup penilaian kondisi keuangan perusahaan dan pengumpulan serta penyaluran dana, diukur berdasarkan modal keseluruhan dan likuiditas, (Nworie et al., 2023). Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui penggunaan asetnya dan mencerminkan kesehatan keuangan keseluruhan Perusahaan, (Tudose et al., 2022).

Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan

suatu perusahaan yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset, menghasilkan keuntungan, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka waktu tertentu.

2.1.4.2 Tujuan Dan Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Nworie et al (2023) tujuan utama dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan meliputi:

1. Mengetahui Tingkat Likuiditas

Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera diselesaikan saat ditagih.

2. Mengetahui Tingkat Solvabilitas

Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi.

3. Mengetahui Tingkat Profitabilitas

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

4. Mengetahui Tingkat Stabilitas

Menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya secara stabil, termasuk kemampuan membayar beban bunga atas hutang tepat waktu.

Menurut Nworie et al (2023) manfaat dari pengukuran kinerja keuangan antara lain:

1. Mengelola Operasi Secara Efektif dan Efisien

Melalui pemotivasian karyawan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Membantu Pengambilan Keputusan

Sebagai dasar dalam keputusan terkait promosi, transfer, dan pemberhentian karyawan.

3. Mengidentifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan

Menentukan kebutuhan pelatihan serta evaluasi program pengembangan karyawan.

4. Menyediakan Umpan Balik bagi Karyawan

Memberikan informasi kepada karyawan tentang bagaimana atasan menilai kinerja mereka.

5. Dasar Distribusi Penghargaan

Sebagai acuan dalam pemberian penghargaan atau insentif kepada karyawan.

2.1.4.3 Indikator Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu, yang mencerminkan kondisi kesehatan dan efisiensi operasional perusahaan. Dalam penelitian ini, menurut Xu & Liu (2021) kinerja keuangan diukur dengan indikator yaitu *Return on Assets* (ROA).

Mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Rumus ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wijaya & Sari (2023)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan LQ45	Variabel Independen: Dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional Variabel Dependen: ROA, ROE	Dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan ROE, sementara komisaris independen tidak berpengaruh signifikan	Menggunakan indeks LQ45 dan menganalisis pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Periode penelitian 2019-2021 dan hanya menggunakan tiga mekanisme GCG
2	Purnomo et al. (2023)	<i>The Effect of Good Corporate Governance on Financial Performance: Evidence from LQ45 Companies in Indonesia</i>	Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit Variabel Dependen: ROA, ROE, NPM	Semua mekanisme GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kecuali kepemilikan manajerial yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap ROA	Menggunakan sampel perusahaan LQ45 dan berfokus pada GCG dan kinerja keuangan	Periode penelitian 2020-2022 dan menggunakan NPM sebagai indikator tambahan
3	Hartono & Pratama (2023)	Dampak Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Blue Chip Indonesia	Variabel Independen: Dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit Variabel Dependen: ROA, ROE, Tobin's Q	Dewan direksi dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh signifikan	Menganalisis perusahaan blue chip (termasuk LQ45) dan mengkaji hubungan GCG dengan kinerja keuangan	Periode penelitian 2020-2022 dan menggunakan Tobin's Q sebagai pengukuran nilai pasar
4	Rahmawati & Utami	Analisis Pengaruh	- Variabel Independen:	CGI berpengaruh	Menggunakan perusahaan	Menggunakan pendekatan

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(2024)	Corporate Governance Index terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan LQ45 di Masa Pemulihan Ekonomi	Corporate Governance Index Variabel Dependen ROA, ROE, EPS	positif signifikan terhadap semua indikator kinerja keuangan dengan korelasi terkuat pada ROE	LQ45 dan meneliti hubungan GCG dengan kinerja keuangan	indeks komposit untuk GCG dan berfokus pada periode pemulihan ekonomi post-pandemi
5	Susanto et al. (2024)	<i>Good Corporate Governance and Financial Performance: A Comparative Study of LQ45 Companies During Economic Transition</i>	Variabel Independen: Dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional Variabel Dependen: ROA, ROE, PBV	Semua variabel GCG menunjukkan pengaruh positif pada kinerja keuangan dengan efek tertinggi pada perusahaan sektor keuangan	Menggunakan sampel perusahaan LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Melakukan analisis perbandingan antar sektor industri dan menggunakan PBV sebagai indikator tambahan
6	Darmawan & Fitri (2023)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Tata Kelola terhadap Profitabilitas Perusahaan LQ45	Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing Variabel Dependen: ROA, ROE	Kepemilikan institusional dan asing berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara kepemilikan manajerial tidak menunjukkan pengaruh signifikan	Menggunakan perusahaan LQ45 dan menganalisis aspek GCG terhadap kinerja keuangan	Berfokus pada struktur kepemilikan sebagai mekanisme GCG dan periode penelitian 2020-2022
7	Gunawan & Hakim (2023)	<i>Impact of Board Characteristics on Financial Performance of Indonesian LQ45 Index Companies</i>	Variabel Independen: Ukuran dewan, diversitas dewan, independensi dewan Variabel Dependen: ROA, ROE, ROCE	Diversitas dewan berpengaruh paling signifikan terhadap kinerja keuangan, diikuti oleh independensi dewan, sementara ukuran dewan menunjukkan hasil yang	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Berfokus pada karakteristik dewan sebagai aspek GCG dan menggunakan ROCE sebagai pengukuran tambahan

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
8	Lestari et al. (2023)	Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada Emiten LQ45	Variabel Independen: Corporate governance score Variabel Dependen: ROA, ROE, Tobin's Q	beragam GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan dengan efek mediasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti hubungan GCG dengan kinerja keuangan	Menambahkan nilai perusahaan sebagai variabel dependen dan menganalisis efek mediasi
9	Ibrahim & Jaya (2023)	<i>Corporate Governance Mechanisms and Financial Stability: Evidence from LQ45 Companies</i>	Variabel Independen: Dewan komisaris, komisaris independen, komite audit Variabel Dependen: ROA, Z-Score Altman	Mekanisme GCG berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan dengan komite audit menunjukkan pengaruh paling signifikan	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh mekanisme GCG	Berfokus pada stabilitas keuangan dan menggunakan Z-Score Altman sebagai indikator tambahan
10	Wibowo & Mulyani (2024)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan LQ45	Variabel Independen: GCG (dewan komisaris, komisaris independen), struktur modal (DER) Variabel Dependen: ROA, ROE	GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sementara struktur modal menunjukkan pengaruh negatif	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Menambahkan struktur modal sebagai variabel independen dan menganalisis interaksinya dengan GCG
11	Kurniawan et al. (2024)	<i>The Role of Corporate Governance in Enhancing Financial Performance During Market Volatility: A Study of LQ45 Index</i>	Variabel Independen: GCG index, kepemilikan institusional, dewan komisaris Variabel Dependen: ROA, ROE, EVA	GCG berperan signifikan dalam menjaga kinerja keuangan selama periode volatilitas pasar dengan	Menggunakan sampel LQ45 dan menganalisis hubungan GCG dengan kinerja keuangan	Berfokus pada periode volatilitas pasar dan menggunakan EVA sebagai pengukuran tambahan

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				kepemilikan institusional sebagai faktor terkuat		
12	Santoso & Putri (2023)	Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Efisiensi dan Profitabilitas pada Perusahaan LQ45	Variabel Independen: Dewan direksi, komisaris independen, komite audit Variabel Dependen: Rasio efisiensi operasional, ROA, ROE	Mekanisme GCG berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional yang selanjutnya meningkatkan profitabilitas perusahaan	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Menambahkan efisiensi operasional sebagai variabel antara dan periode penelitian 2019-2022
13	Utomo & Rahardjo (2023)	<i>Good Corporate Governance and Financial Performance in High Market Capitalization Companies: Indonesian LQ45 Index Case</i>	Variabel Independen: Dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit Variabel Dependen: ROA, ROE, PER	Semua variabel GCG kecuali kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Menggunakan PER sebagai indikator tambahan dan berfokus pada perusahaan dengan kapitalisasi pasar tinggi
14	Pratiwi & Hidayat (2024)	Dampak Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan LQ45	Variabel Independen: Indeks transparansi, indeks akuntabilitas Variabel Dependen: ROA, ROE, NPM	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap semua indikator kinerja keuangan dengan efek terkuat pada NPM	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh prinsip GCG terhadap kinerja keuangan	Berfokus pada dua prinsip spesifik GCG dan menggunakan pendekatan indeks
15	Nugroho et al. (2023)	<i>The Influence of Corporate Governance Quality on Financial Performance and Dividend Policy of LQ45 Companies</i>	Variabel Independen: GCG score Variabel Dependen: ROA, ROE, DPR	Kualitas GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kebijakan dividen	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Menambahkan kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan menganalisis efek moderasi sektor industri

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				dengan efek moderasi dari sektor industri		
16	Harahap & Sinaga (2024)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Risiko Perusahaan pada Emiten LQ45	Variabel Independen: Dewan komisaris, komisaris independen, komite audit Variabel Dependen: ROA, ROE, risiko sistematis (beta)	Mekanisme GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Menambahkan risiko perusahaan sebagai variabel dependen dan periode penelitian 2020-2023
17	Sudarma & Putra (2023)	<i>Corporate Governance Implementation and Financial Performance: Comparative Analysis Between Financial and Non-Financial LQ45 Companies</i>	Variabel Independen: GCG index Variabel Dependen: ROA, ROE, EPS	Implementasi GCG berpengaruh lebih signifikan pada kinerja keuangan perusahaan sektor keuangan dibandingkan non-keuangan	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Melakukan analisis perbandingan antara perusahaan sektor keuangan dan non-keuangan
18	Wardhani et al. (2024)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan LQ45 di Era Digital	Variabel Independen: Struktur kepemilikan, ukuran dewan, diversitas dewan Variabel Dependen: ROA, ROE, Tobin's Q	Diversitas dewan menunjukkan pengaruh paling signifikan terhadap kinerja keuangan di era digital, diikuti oleh struktur kepemilikan	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Berfokus pada transformasi digital dan periode penelitian 2021-2023
19	Yuliana & Mardani (2023)	<i>The Impact of Corporate Governance on Financial Performance and Sustainability of LQ45 Index Companies</i>	Variabel Independen: GCG score Variabel Dependen: ROA, ROE, ESG score	GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan dengan hubungan resiprokal	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Menambahkan aspek keberlanjutan (ESG) dan menganalisis hubungan resiprokal

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				antara kinerja keuangan dan keberlanjutan		
20	Firmansyah & Astuti (2024)	Analisis Pengaruh Good Corporate Governance dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Indeks LQ45	Variabel Independen: GCG (dewan komisaris, komisaris independen), Intellectual Capital (VAIC) Variabel Dependen: ROA, ROE, PBV	GCG dan intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan efek interaksi yang saling memperkuat	Menggunakan sampel LQ45 dan meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan	Menambahkan intellectual capital sebagai variabel independen dan menganalisis efek interaksinya dengan GCG

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

2.3 Kerangka konseptual

2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independent Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris independen merupakan komponen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang berperan sebagai pengawas manajemen, (Kurniawan et al., 2024). Keberadaan anggota dewan yang independen diharapkan dapat memberikan pengawasan yang objektif dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam operasional perusahaan. Dengan independensi ini, dewan komisaris dapat menilai dan mengontrol jalannya perusahaan dengan lebih jujur, adil, serta menghindari konflik kepentingan yang merugikan pemegang saham, (Purnomo et al., 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen yang proporsional dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen dalam mengelola sumber daya Perusahaan, (Firmansyah & Astuti, 2024). Hal ini berimplikasi pada peningkatan kepercayaan investor dan pemangku

kepentingan lainnya, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan, seperti laba bersih, ROA, dan ROE. Penelitian ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Wijaya & Sari (2023), Purnomo et al. (2023), Susanto et al. (2024), Ibrahim & Jaya (2023), Wibowo & Mulyani (2024), Kurniawan et al. (2024), Utomo & Rahardjo (2023), Harahap & Sinaga (2024), Firmansyah & Astuti (2024) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris independent berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Namun, terdapat juga pandangan bahwa jumlah dewan independen yang terlalu tinggi tidak selalu menjamin efisiensi dalam pengambilan Keputusan, (Susanto et al., 2024). Peran mereka yang hanya sebagai pengawas dan bukan eksekutor seringkali terbatas pada rekomendasi, sehingga efektivitas pengaruhnya terhadap kinerja keuangan sangat bergantung pada sejauh mana saran mereka diakomodasi oleh manajemen Perusahaan, (Wibowo & Mulyani, 2024)

2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit memiliki fungsi penting dalam membantu dewan komisaris untuk mengawasi laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta proses audit internal dan eksternal, (Harahap & Sinaga, 2024). Komite ini diharapkan dapat mendeteksi lebih awal potensi penyimpangan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan dan proses operasional Perusahaan, (Susanto et al., 2024). Dengan demikian, peran aktif komite audit berkontribusi pada keandalan laporan keuangan yang pada akhirnya mendukung pencapaian kinerja keuangan yang sehat. Hasil penelitian ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Purnomo et al. (2023), Hartono & Pratama (2023), Susanto et al. (2024), Ibrahim & Jaya (2023), Santoso

& Putri (2023), Utomo & Rahardjo (2023), Harahap & Sinaga (2024) yang menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Keberadaan dan kualitas anggota komite audit sangat memengaruhi efektivitas pengawasannya. Komite audit yang memiliki kompetensi akuntansi dan pengalaman yang memadai mampu memberikan rekomendasi yang relevan terhadap perbaikan proses bisnis. Dalam jangka panjang, peran tersebut berkontribusi terhadap efisiensi operasional dan peningkatan nilai Perusahaan, (Ibrahim & Jaya, 2023).

Sebaliknya, jika komite audit hanya bersifat formalitas tanpa fungsi pengawasan yang nyata, maka dampaknya terhadap kinerja keuangan menjadi minim. Kurangnya pelatihan, ketidakterlibatan aktif, atau minimnya independensi dapat mengurangi pengaruh komite audit terhadap perbaikan sistem keuangan perusahaan secara menyeluruh, (Ibrahim & Jaya, 2023).

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi besar lainnya. Institusi tersebut umumnya memiliki sumber daya dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara profesional, (Hartono & Pratama, 2023). Dengan pengawasan ketat dari investor institusional, perusahaan cenderung menjalankan praktik manajerial yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka Panjang, (Wardhani et al., 2024).

Penelitian ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Wijaya & Sari (2023), Purnomo et al. (2023), Hartono & Pratama (2023), Wardhani et al. (2024), Darmawan & Fitri (2023), Kurniawan et al. (2024), Utomo & Rahardjo (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Institusi pemilik saham biasanya mendorong manajemen untuk fokus pada efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perusahaan, (Purnomo et al., 2023). Karena memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan finansial perusahaan, institusi ini cenderung menekan pihak manajemen untuk memaksimalkan kinerja dan meminimalkan tindakan yang merugikan pemegang saham seperti penggelapan atau pengambilan keputusan yang tidak efisien, (Wijaya & Sari, 2023)

Namun, terdapat kemungkinan bahwa kepemilikan institusional yang dominan justru dapat menciptakan tekanan berlebih terhadap manajemen untuk mengejar laba jangka pendek, (Darmawan & Fitri, 2023). Dalam beberapa kasus, hal ini bisa berdampak negatif terhadap keputusan strategis jangka panjang, yang bisa menurunkan kualitas keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan, (Utomo & Rahardjo, 2023)

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial merujuk pada jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen atau direktur perusahaan. Ketika manajemen juga menjadi pemilik saham, terdapat kecenderungan bahwa mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap hasil keputusan yang diambil karena berpengaruh langsung

terhadap kepentingan pribadi mereka. Teori keagenan menyatakan bahwa penyelarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat meningkatkan kinerja Perusahaan, (Darmawan & Fitri, 2023)

Hasil penelitian ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Purnomo et al. (2023), Darmawan & Fitri (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dengan memiliki saham, manajemen akan terdorong untuk bekerja lebih efisien, menghindari pemborosan, dan fokus pada pencapaian keuntungan yang optimal. Hal ini karena setiap peningkatan kinerja keuangan perusahaan akan secara langsung meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial dianggap dapat menjadi mekanisme internal yang efektif dalam mengontrol perilaku oportunistik manajer, (Purnomo et al., 2023)

Namun, kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah, seperti dominasi keputusan oleh kelompok manajerial tertentu yang bisa mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan baru dan pada akhirnya menurunkan nilai perusahaan jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik.

2.3.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independent, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang menyeluruh dalam mengatur dan mengontrol perusahaan agar dapat berjalan secara efisien,

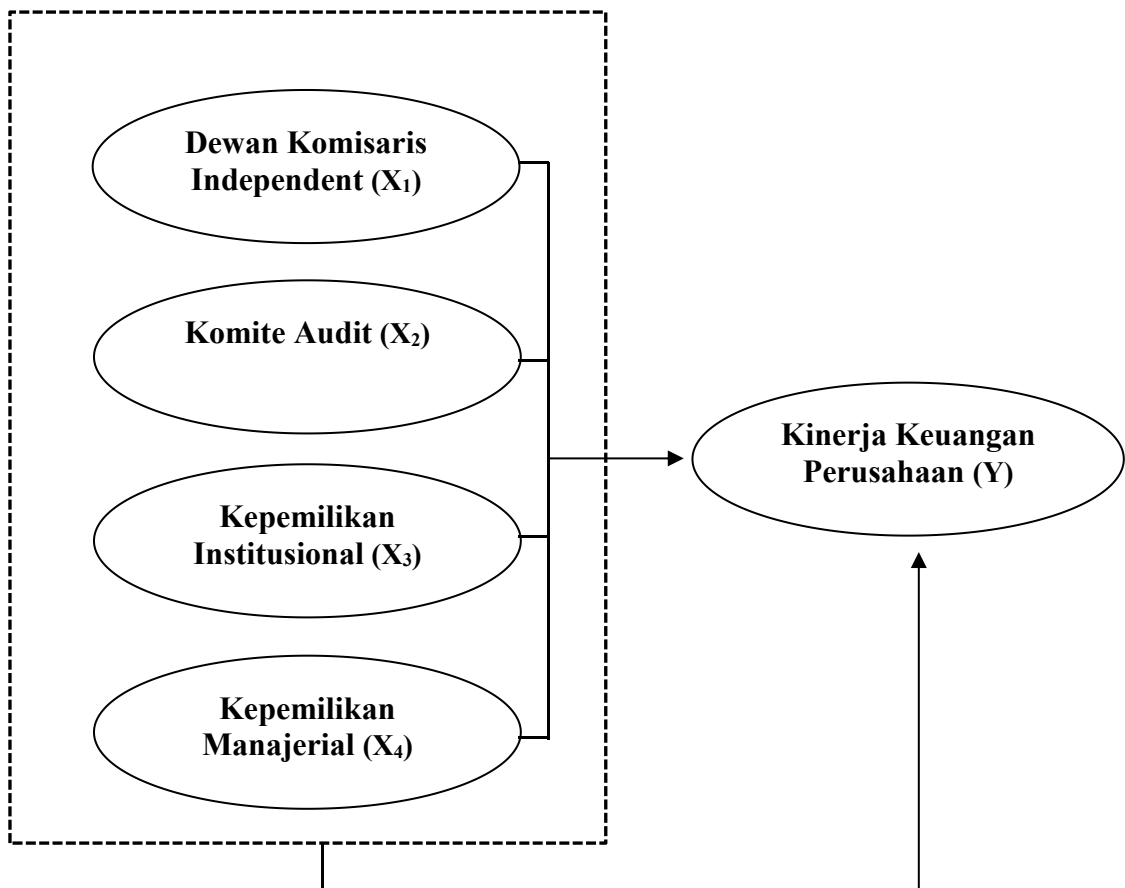
transparan, dan akuntabel, (Utomo & Rahardjo, 2023). Gabungan antara dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial membentuk mekanisme yang dapat menurunkan risiko konflik keagenan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sinergi dari elemen-elemen tersebut memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap manajemen, (Firmansyah & Astuti, 2024)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Wijaya & Sari (2023), Purnomo et al. (2023), Susanto et al. (2024), Lestari et al. (2023), Wibowo & Mulyani (2024), Utomo & Rahardjo (2023), Pratiwi & Hidayat (2024), Firmansyah & Astuti (2024) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris independent, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Ketika semua komponen GCG berfungsi secara optimal, perusahaan akan memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, laporan keuangan yang andal, dan keputusan strategis yang selaras dengan kepentingan pemegang saham, (Purnomo et al., 2023). Hal ini akan menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan daya saing perusahaan, serta memberikan nilai tambah bagi pemilik modal melalui peningkatan ROA, ROE, dan indikator kinerja keuangan lainnya, (Wibowo & Mulyani, 2024).

Namun, jika salah satu atau beberapa komponen GCG tidak dijalankan secara efektif, maka keseluruhan sistem pengawasan perusahaan dapat terganggu. Oleh karena itu, keterpaduan antar elemen GCG menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berjalan dalam jalur yang sesuai dengan

prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan berdampak positif terhadap kinerja keuangannya, (Lestari et al., 2023).



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Keterangan :

Variabel Dependen : Dewan Komisaris Independent, Komite Audit,
Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial

Variabel Independen : Kinerja Keuangan Perusahaan

→ : Pengujian Secara Parsial

- - - → : Pengujian Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Dewan komisaris independent berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan studi kasus pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023
- H₂: Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan studi kasus pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023.
- H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan studi kasus pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023
- H₄: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan studi kasus pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023
- H₅: Dewan komisaris independent, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan studi kasus pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023